

COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL DALAM MEMBANGUN SUSTAINABLE INTEGRATED ECOTURISM DI LMDH PUNCAK LESTARI CISARUA KABUPATEN BOGOR

Hamka¹, Yussi Nadia², Heli Supardi³, Fajrin Namora⁴, Fiska Devi Jiasti⁵

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3,4,5}

laiccahamka@gmail.com¹

Abstract

The challenge of developing sustainable ecotourism is how to involve all stakeholders in tourism management by maintaining a balance of economic, social and environmental aspects. Problems found in the reality are management orientation that prioritizes economic aspects without paying attention to socio-cultural impacts and environmental sustainability. In addition, all parties involved in ecotourism management have not been fully involved in realizing ecotourism in a sustainable practice. This study aims to analyze and assess the management of Sustainable Integrated Ecotourism based on collaborative governance in the ecotourism area of LMDH Puncak Lestari Bogor. Researchers seek to observe and comprehend collaboration and the role of stakeholders in collaboration so as to form a collaboration in ecotourism development. This study uses a qualitative approach with in-depth interview data collection methods and documentation. The results of the study show that during the Covid-19 pandemic, the government is no longer became the party that dominates the management of ecotourism. In the development of ecotourism, the government has involved the private/business sector, academia, the media and encouraged community participation through empowerment. Each stakeholder has a key role in ecotourism management. To improve the implementation of collaborative governance, effective communication is needed to make it easier for stakeholders to interact so that they can optimize their role in the development of sustainable tourism ecotourism at LMDH Puncak Lestari Bogor.

Keywords: *collaborative governance, stakeholders, sustainable, ecotourism.*

Abstrak

Tantangan pengembangan ekowisata berkelanjutan adalah bagaimana melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata dengan menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Persoalan ditemukan di lapangan yaitu orientasi pengelolaan yang lebih mengutamakan aspek ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial budaya dan kelestarian lingkungan. Selain itu, seluruh pihak terkait dalam pengelolaan ekowisata belum terlibat secara penuh untuk mewujudkan ekowisata secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menilai pengelolaan *Sustainable Integrated Ecotourism* berbasis *collaborative governance* di kawasan ekowisata LMDH Puncak Lestari Bogor. Peneliti berupaya melihat kolaborasi dan peran para *stakeholder* dalam kerjasama sehingga membentuk sebuah kolaborasi dalam pengembangan ekowisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemik Covid-19 pemerintah tidak lagi menjadi pihak yang mendominasi pengelolaan ekowisata. Dalam pengembangan ekowisata, pemerintah telah melibatkan sektor swasta/bisnis, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran kunci dalam pengelolaan ekowisata. Untuk meningkatkan pelaksanaan *collaborative governance* dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para *stakeholder* melakukan interaksi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan ekowisata wisata berkelanjutan di LMDH Puncak Lestari Bogor.

Kata Kunci: tata kelola kolaboratif, pemangku kepentingan, berkelanjutan, ekowisata.

PENDAHULUAN

Sektor Pariwisata saat ini yang paling berdampak dengan adanya *pandemic Covid-19*. Sebuah tantangan besar kedepan bagaimana keberlanjutan dari pengembangan pariwisata di Indonesia. Untuk dapat terus *survive* pada kondisi saat ini, penting peran pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam menyusun regulasi terkait strategi pengembangan sektor pariwisata. Salah satu bagian dari sektor pariwisata adalah ekowisata yaitu pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan lingkungan, yang saat ini juga terkena imbas dari *pandemic Covid-19*. Maka sudah barang tentu perlu terobosan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan.

Lokasi penelitian kali ini memilih LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Puncak Lestari Cisarua Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena beberapa potensi usaha yang telah ada, antara lain wisata alam Danau Telaga Warna, Kopi Cibulao yang merupakan grade premium dunia, madu hutan trigona, Hutan wisata Citamiang/camping ground/ 0 km Ciliwung, Wisata edukasi herbal, Bike Tracking Tourism. LMDH Puncak Lestari berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi dalam pengelolaan Perum Perhutani (BUMN) dengan luas area pemanfaatan hutan \pm 600 Ha yang beranggotakan 148 KK.

Pandemik *covid 19* menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola ekowisata di LMDH Puncak Lestari Bogor selain beberapa tantangan lainnya yaitu: mempertahankan fungsi konservasi lingkungan di kawasan ekowisata, mempertahankan peran *sociocultural* dalam kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang terkait perlindungan kawasan hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif disektor pariwisata dan kemampuan bermitra dengan pihak luar dalam pengembangan ekowisata terintegrasi yang mencakup potensi sektor pariwisata di seluruh Kabupaten Bogor.

Ada dua hal yang menjadi permasalahan mendasar dalam penelitian ini yaitu:

1. Menurunnya angka wisatawan yang cukup drastis akibat pandemi covid 19, sehingga berdampak bagi sosial, ekonomi dan lingkungan di kawasan ekowisata tersebut, dan
2. Belum terintegrasinya pengelolaan ekowisata di LMDH Puncak Lestari dg potensi usaha di Kab. Bogor

Penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya masih belum membangun model kolaborasi antar stakeholder secara terintegrasi dengan multi level stakeholder serta pelibatan mulai dari unsur Pemerintah Pusat berupa Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, pihak swasta/pelaku usaha, akademisi/ perguruan tinggi, civil society/NGO/Ormas maupun media massa (*pentahelix model*).

Penelitian kali ini juga memunculkan beberapa pertanyaan penelitian, yang diproyeksikan dapat menjawab tantangan dalam pengembangan ekowisata terpadu di LMDH Puncak Lestari Bogor. Pertanyaan penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan ekowisata di LMDH Puncak Lestari Kabupaten Bogor
2. Bagaimanakah peran para stakeholder dalam membangun *colaborative governance* untuk meningkatkan pengelolaan ekowisata berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penelitian ini dibagi dalam dua terminologi yaitu untuk:

1. Mengetahui kolaborasi pemangku kepentingan dalam perkembangan ekowisata di LMDH Puncak Lestari Bogor.
2. Mengidentifikasi peran stakeholders dalam berkolaborasi untuk pengembangan dan pengelolaan ekowisata di LMDH Puncak Lestari secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan kolaboratif di sektor pariwisata dan teori manajemen ekowisata terpaduan implikasinya. Juga, memberikan dan menambah wawasan seluruh stakeholders tentang pengelolaan kolaboratif ekowisata berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan dan kolaborasi ekowisata, serta menyediakan informasi kepada pihak terkait dalam mengembangkan model kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan.

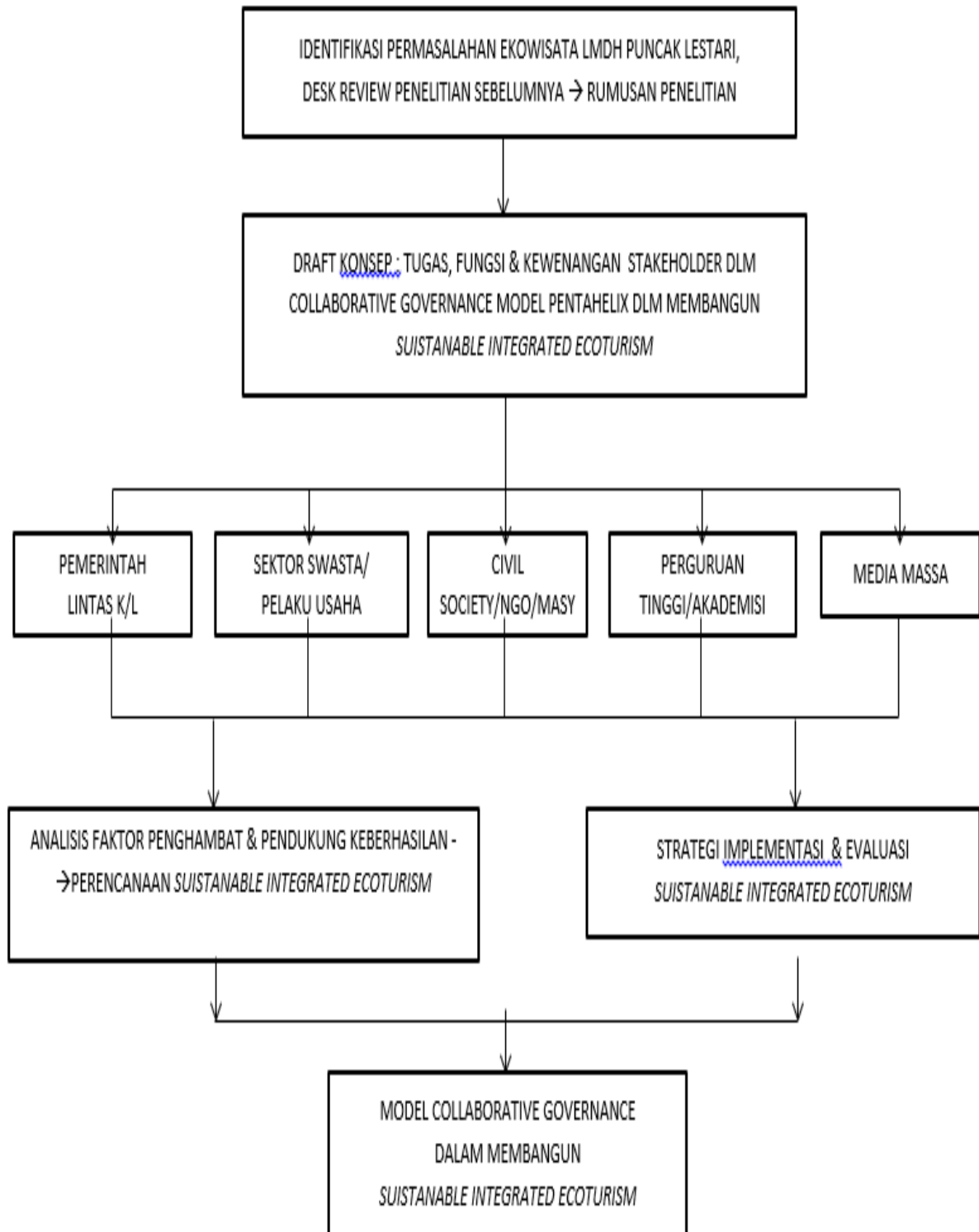
KAJIAN LITERATUR

Collaborative Governance

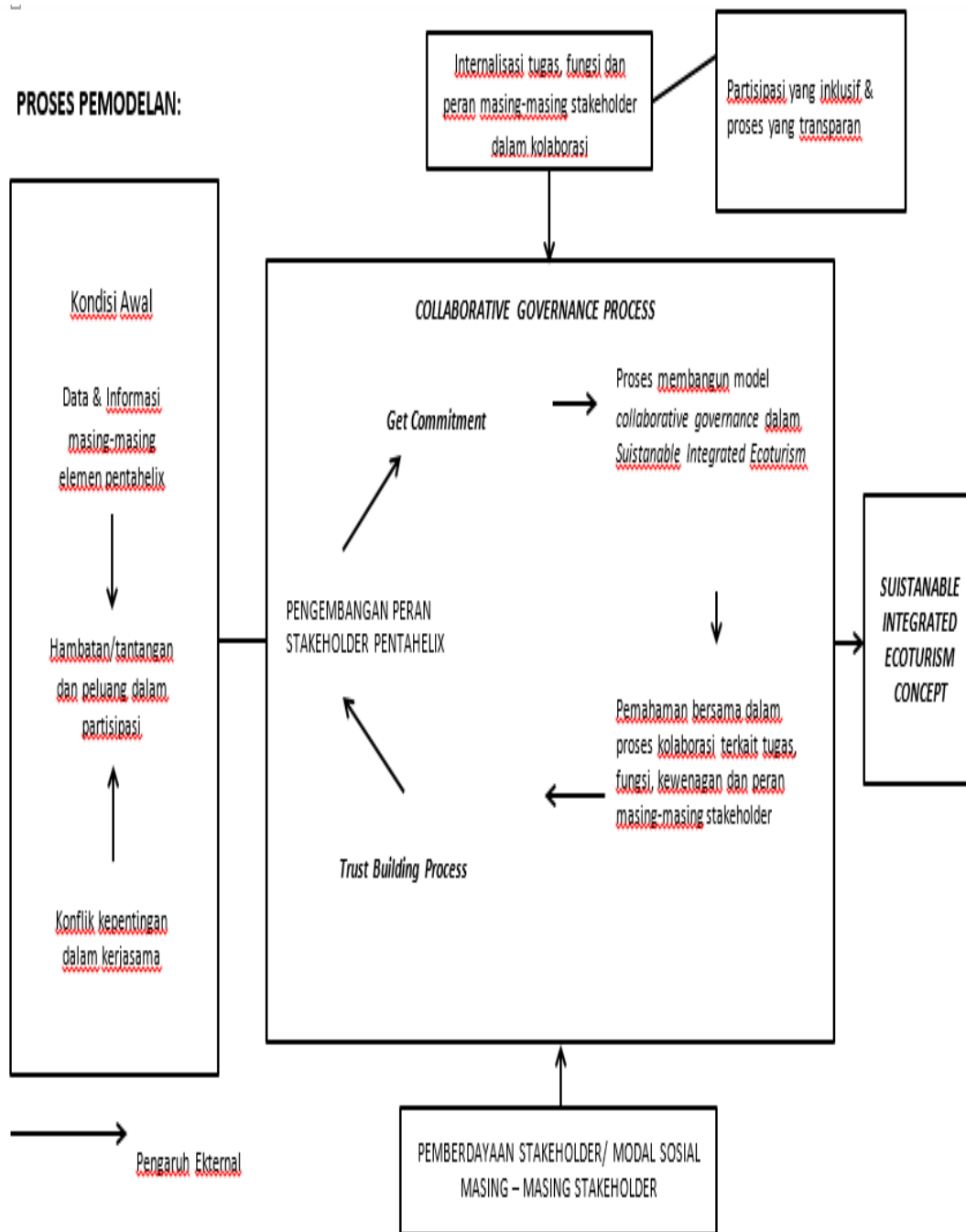
Sejarah pelayanan publik melalui *collaborative governance model pentahelix* di Indonesia, belum pernah dilakukan dengan multi stakeholder dan multi level. Beberapa yang telah dilakukan khususnya di bidang pariwisata masih terbatas pada tataran Pemda Provinsi maupun Kabupaten. Belum terintegrasi, dengan melibatkan khususnya media massa baik *mainstream* maupun *media digital*. Belum berbasis teknologi informasi (baik sebagai “tools” maupun *database management*). Dengan terbangunnya *database management* diharapkan *collaborative governance* dapat berkelanjutan, dan pelibatan *stakeholder* lainnya juga dapat semakin berkembang.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, masih belum membangun model kolaborasi antar stakeholder dan multilevel secara terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen yang dapat bersinergi antara lain: Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, pihak swasta, akademisi/Perguruan Tinggi, *Civil Society* maupun mass media. Menurut Ansell dan Gash mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif dan bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset public. *Collaborative Governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *Collaborative Governance* menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepastian di antara peran aktor tersebut. *Collaborative Governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah. *Collaborative Governance* merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Gambar 1. Model Berpikir



Gambar 2. Proses Pemodelan



Pengembangan Model Ekowisata

Teori ekowisata menurut *The Ecotourism Society (1990)* adalah perjalanan pariwisata yang dilakukan ke dalam area yang masih alami dengan tujuan mengkonservasi, melestarikan serta mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan wilayahnya tersebut. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan serta keaslian ekosistem di areal yang masih alami.

Pengembangan konsep ekowisata sudah semestinya berorientasi pada kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Pada penelitian ini merupakan, pengembangan model ekowisata yang

terintegrasi dengan sektor perdagangan dihulu dan sektor industri dihilirnya. Pengembangan ekowisata yang merupakan sistem pertanian berbasis *agroforestry* dengan tanaman kopi dan herbal sebagai HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) unggulan.

Strategi pencapaian

Masing – masing stakeholder memerankan tugas dan fungsinya di masing-masing level:

1. Pemerintah Pusat bersama K/L terkait (KLHK, Kementan, Kemenparekraf, Kemenkop & UKM, Kemendag, Kemenperindustrian) menyusun kebijakan dalam pendampingan: pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan serta pengelolaan usaha ekowisata.
2. Pemerintah Daerah bersama SKPD terkait (DLH, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi&UKM, Dinas Pariwisata, Disperindag) mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk: pembinaan manajemen ekonomi, sosial dan lingkungan; pengaturan budget sharing; pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata, dll
3. Perum Perhutani (BUMN), sebagai mitra LMDH Puncak Lestari di tingkat tapak kegiatan, khususnya dalam pengawasan kawasan hutan PHRI berperan dalam ekspose & branding “sustainable integrated ecotourism”.
4. Asosiasi exportir kopi Indonesia, supporting dalam sertifikasi kopi Cibulao Sektor swasta dalam pemanfaatan dana CSR dalam mendukung pelestarian kawasan hutan dan pengembangan usaha, serta pemasaran produk “*sustainable integrated ecotourism*”.
5. Akademisi/Perguruan Tinggi dalam pendampingan kepada masyarakat terkait tri dharma perguruan tinggi yaitu: pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat
6. Media massa dalam mempromosikan produk produk ekowisata LMDH Puncak Lestari, melalui digital marketing secara berkala

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di LMDH Puncak Lestari Cisarua Kabupaten Bogor, merupakan penelitian kualitatif partisipatif. Ruang lingkup penelitian ini melingkupi peran multipihak/ stakeholder pentahelix (Kementerian/Lembaga, Pihak Swasta/Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi/Akademisi, Civil Society/Masyarakat Madani/LSM/ORMAS, Media Massa) dalam melakukan kolaborasi dalam membangun *Sustainable Integrated Ecotourism*. Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan LMDH Puncak Lestari telah memegang SK. Izin Perhutanan Sosial Kulin KK sejak tahun 2017 yang merupakan mitra dari Perum Perhutani. Objek penelitian ini berupa ekowisata yang telah berjalan selama lima tahun yang tergabung dalam Paguyuban Tani LMDH Puncak Lestari Cisarua, Kabupaten Bogor.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sejarah LMDH Puncak Lestari, perkembangannya, kegiatan kegiatan yang dilakukan, hingga peran ekonomi, sosial dan ekologinya. Sementara itu data sekunder meliputi data profil LMDH Puncak Lestari Cisarua, terkait jumlah wisatawan yang berkunjung, jumlah produksi kopi cibulao, madu hutan, tanaman herbal dan data demografi. Jenis dan sumber data primer maupun sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode:

- 1) Wawancara mendalam (*depth interview*) kepada para penentu kebijakan dan para stakeholder terkait sampai ke tingkat tapak, dengan melakukan dialog intensif, terarah, terstruktur dan menggali informasi secara dalam antara narasumber dan peneliti. Tahapan wawancara dilakukan dengan menyiapkan materi terkait permasalahan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan peran masing-masing narasumber maupun keahlian/kepakaran narasumber, sehingga diperoleh data yang valid kebenaran dan keabsahannya.
- 2) Observasi lapangan; dengan melakukan pengamatan di tapak kegiatan perhutanan sosial dan berdialog terbuka dua arah antara para anggota LMDH dengan peneliti, sehingga didapatkan data riil di lapangan yang menunjang analisis data menjadi lebih akurat dan valid.
- 3) *FGD (Focus Group Discussion)*; dalam bentuk pertemuan – pertemuan koordinasi multipihak antar stakeholder, sehingga akan ditemukan kendala dan permasalahan, serta mensinergikan program – program antar lembaga atau stakeholder terkait sehingga dapat menjadi satu model *collaborative governance*.
- 4) *Desk study/ review dokumen*: yang digunakan sebagai referensi dalam analisis data dan informasi. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang akurat dan *akuntable*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dimana analisis deskriptif digunakan untuk menarasikan kelembagaan LMDH Puncak Lestari. Indikator peran dibagi menjadi tiga yaitu indikator ekonomi, indikator sosial dan indikator ekologi. Berikut tahapan dalam pengolahan dan analisis data:

- 1) Hasil dari pengumpulan data diolah menjadi data yang siap dianalisis dengan metode awal berupa *desk study analysis*;
- 2) Selanjutnya data hasil *desk study analysis* menjadi bahan telaahan dalam *brainstorming* melalui forum *FGD* untuk menampung seluruh pendapat dari pakar perhutanan sosial, penentu kebijakan serta para pelaku baik petani hutan maupun pendamping perhutanan sosial yang telah berhasil dalam pendampingannya, sehingga LMDH Puncak Lestari menjadi mandiri di tiga pilar kelola perhutanan sosial (Kelola kelembagaan, Kelola Kawasan dan kelola Usaha);
- 3) Penyusunan peta jalan (*roadmap*) dan rencana strategis capaian perencanaan sustainable integrated ecotourism oleh para pihak terkait, yang didapat dari pengumpulan data secara wawancara, observasi lapangan, maupun *FGD*, ditingkat *multi stakeholder*;
- 4) Perumusan implementasi sinergitas kegiatan stakeholder ditingkat tapak (*intermediate outcomes*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan strategis destinasi wisata atau daerah tujuan wisata merupakan tugas yang kompleks karena saling ketergantungan dari berbagai pemangku kepentingan dan kontrol yang terfragmentasi atas sumber daya destinasi (Jamal & Getz, 1995). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar aktor melalui optimasi peran *bussiness, government, community, academic* dan media massa. Elemen kolaborasi yang dimaksud dalam dalam kajian ini yaitu pemerintah, akademisi, pihak swasta/pelaku usaha, masyarakat atau komunitas masyarakat/*Civil Society*, dan media masa atau lebih dikenal dengan model *Pentahelix*.

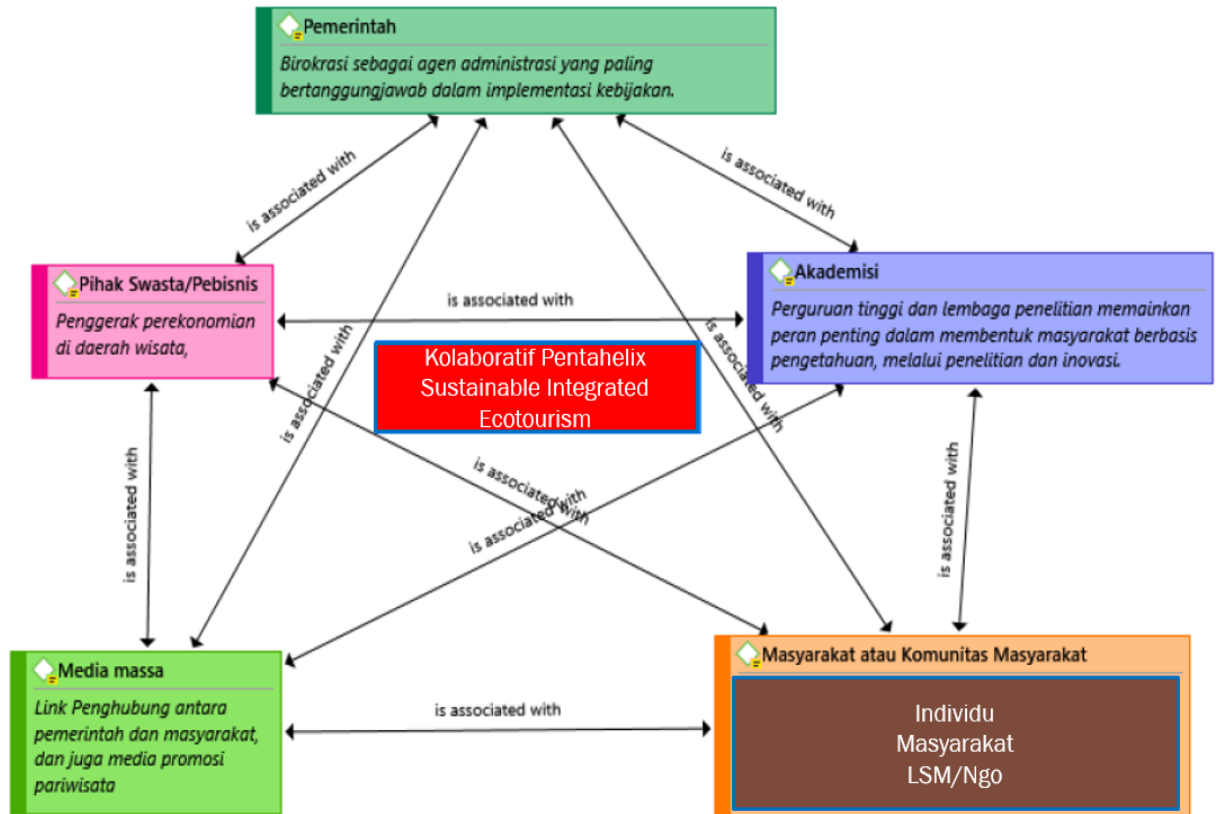
Elemen-elemen tersebut selanjutnya dijabarkan atau dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pemerintah Organisasi pemerintah yaitu birokrasi, sebagai dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Salah satu komponen backward mapping yang mendukung implementasi adalah struktur pelaksana (Elmore, 1980). Pada negara maju maupun negara yang sedang berkembang (NSB). Kewenangan yang besar pada birokrasi untuk sepenuhnya menguasai “area” implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena adanya mandat dari lembaga legislatif (Yuningsih, Darmi, & Sulandari, 2019). Birokrasi pemerintah daerah yang diharapkan terlibat dalam model pentahelix pengembangan ecowisata di LMDH Puncak Lestari yaitu kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dinas ataupun Lembaga Teknis Daerah yang memiliki peran dalam urusan pariwisata, kebudayaan dan kesenian; perencanaan pengembangan pariwisata yang tersusun dalam Rencana Strategis (Renstra); penyedia akses dan infrastruktur berkaitan dengan kepariwisataan; memfasilitasi bidang industri dan perdagangan; memfasilitasi bidang pertanian; memfasilitasi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; penegakkan peraturan dan penertiban wilayah sekitar objek wisata; . Birokrasi sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan publik, namun dalam implementasi kebijakan aktor lain yang juga terlibat adalah legislatif. Legislatif terlibat dalam implementasi ketika ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik, serta menjalankan peran legislasi, *budgeting*, dan *controlling*.
- b. Akademisi sebagai aktor yang sering terlibat dalam kebijakan, memiliki kepakaran dan merupakan lembaga penelitian yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dalam pembangunan pariwisata, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Disamping itu, mempersiapkan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan bakat dan menghasilkan pengetahuan serta keterampilan yang inovatif, giat dan berwirausaha (Halibas et al., 2017). Inovasi menjadi kata kunci dalam keterlibatan akademisi, pada penyebaran informasi maupun penerapan teknologi, kewirausahaan melalui kolaborasi dan kemitraan yang bermanfaat antara akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas dan media massa. Keterlibatan perguruan tinggi yang ada di Bogor atau Jakarta berkontribusi terhadap kemajuan kepariwisataan, serta sosial ekonomi setempat.
- c. Bisnis Banyaknya objek wisata di Bogor, menjadi peluang bagi masyarakat untuk dapat menggerakkan perekonomian daerah dengan menjadi pebisnis/pengusaha. Bisnis di bidang pariwisata cukup ramai, hal tersebut dipengaruhi oleh peran media sosial dalam mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata yang ada. Dengan demikian memberikan peluang bagi masyarakat untuk berbisnis di bidang pariwisata. Produk bisnis yang dapat dikembangkan dalam hal ini, jasa yang diberikan kepada konsumen, seperti: objek wisata sebagai produk utama yang ditawarkan; transportasi (tour&travel penyedia tiket pesawat, rental kendaraan/penyedia transportasi); pemandu wisata (pemilik usaha dapat mempekerjakan masyarakat sekitar objek wisata untuk menjadi pemandu wisata); akomodasi atau penginapan; dan usaha kuliner, serta jasa atau produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.
- d. Aktor lain yang berperan dalam kepariwisataan adalah komunitas (*communnity*). Komunitas dalam kajian ini didefinisikan sebagai masyarakat setempat dalam arti luas, maupun masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat, serta kelompok-kelompok yang dibentuk seperti dewan kesenian daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau kelompok-kelompok berdasarkan minat atau hobi, yang bertujuan mengeksplor atau mempromosikan kepariwisataan di daerah. Masyarakat merupakan

salah satu pemangku kepentingan, memiliki peran dalam pengembangan pariwisata. Peran masyarakat tersebut, dimulai dari perencanaan hingga pada implementasi pembangunan pariwisata di daerah. Konsep *Community Based Tourism (CBT)* mencoba menjelaskan peranan masyarakat dalam pariwisata, yang ditempatkan sebagai aktor utama melalui pemberdayaan, sehingga prioritas manfaat kepariwisataan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

- e. Media Masa Salah satu aktor dalam pengembangan pariwisata adalah media masa. Media massa sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kebijakan, serta sebagai link penghubung antara pemerintah dan masyarakat (Howlett & Ramesh, 1995). Media massa dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, terus mengalami perkembangan yang pesat. Awalnya, kita hanya mengenal bahwa media massa terbagi antara media cetak seperti surat kabar, majalah dan media cetak lainnya, serta media elektronik berupa siaran televisi dan radio. Sedangkan dimasa kini, seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet, maka muncullah new media atau media baru yaitu media sosial seperti; *facebook*, *instagram*, *twitter*, *youtube* dan lainnya. Medium yang mampu menggabungkan/ mengintegrasikan/mengkonvergensi keseluruhan karakteristik media dari bentuk-bentuk terdahulu, dengan tetap berfokus pada proses komunikasi. Kemunculan media baru yang terus berkembang berguna bagi interaksi sosial antara manusia yang bersifat digital, berjejaring dan terkomputerisasi sebagai efek dari kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi (Kurnia, 2005). Interaksi sosial yang terjalin dengan mudah dalam berkomunikasi sebagai contoh melalui penggunaan jejaring sosial seperti *facebook*, *instagram*, *youtube*, *twitter* dan lain sebagainya, membuktikan bahwa komunikasi masa kini tanpa dihalangi oleh jarak dan waktu. Kemampuan media massa yang dapat menyebarluaskan informasi tanpa dibatasi dimensi ruang dan waktu inilah, yang dimanfaatkan dalam sektor pariwisata. Daerah terus mempromosikan objek wisata yang dapat menarik minat para penikmat wisata itu sendiri, baik itu wisata alam, wisata budaya, wisata rohani dan jenis wisata lainnya. Saat ini, dengan kemudahan mengakses media sosial oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, maka masyarakat mulai meninggalkan metode promosi yang bersifat konvensional seperti melalui media cetak dan elektronik, dan beralih pada penggunaan media sosial yang dinilai efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya akun-akun baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, maupun milik pribadi dengan menampilkan dan merekomendasikan daerah tujuan wisata untuk dikunjungi. Pemerintah dalam hal ini birokrasi sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan pariwisata di daerah memiliki peran sangat penting dalam membangun keterkaitan kolaborasi antar sesama aktor lainnya yaitu akademisi, pihak swasta, masyarakat dan media massa sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Pentahelix dalam pengelolaan eco wisata di LMDH Puncak Lestari digambarkan seperti dibawah ini.

Gambar 3. *Pentahelix* dalam pengelolaan ekowisata di LMDH Puncak Lestari



Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sustainable Integrated Ecotourism

Gibson (2000) dan Hetifah (2003:3) berpendapat bahwa stakeholder adalah kelompok dan atau individu yang berinteraksi dengan organisasi atau memiliki interdependensi dan individu atau kelompok manapun yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (secara positif atau negatif) oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik, atau sasaran organisasi. Dalam pengelolaan Ekowisata *Sustainable Integrated Ecotourism*, melibatkan banyak stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruhnya masing-masing.

Brandwell dan Sharman (1999) mengatakan kolaborasi yang positif antar stakeholder akan menciptakan banyak manfaat bagi suatu destinasi seperti menghindari biaya di masa depan, memastikan legitimasi politik, meningkatkan koordinasi kebijakan dan menambah nilai bagi para stakeholder.

Dalam pelaksanaannya, LMDH Puncak Lestari tidak hanya bekerja sendiri tetapi dibantu juga stake holder lainnya. Salah satu strategi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah dengan melalui penggunaan kolaborasi model *pentahelix*. Model *pentahelix* ini pertama kali dikemukakan oleh Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya yang dituangkan kedalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Dalam model *pentahelix* pariwisata terdapat lima elemen publik utama didalamnya yaitu Pemerintah, Sektor Swasta, Masyarakat, Media dan Akademisi.

a. Pemerintah

Pemerintah merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pengelolaan ecotourism LMDH Puncak Lestari Bogor

b. Komunitas

Unsur masyarakat dalam sektor ini diwakilkan oleh beberapa komunitas yang bergerak cukup aktif didalam pengelolaan

c. Media massa

Media berperan sangat aktif dalam pengembangan ecotourism lmdh Puncak Lestari Bogor

d. NGO/LSM

NGO/LSM berperan sangat aktif dalam memberikan bantuan, edukasi dan fasilitasi terhadap kelompok

e. Perguruan Tinggi/Akademisi

perguruan tinggi/akademisi sangat berperan dalam memberikan kajian, riset dan mendorong mahasiswa dalam praktek lapangan di lokasi.

f. BUMN

BUMN sangat berperan dalam memberikan bantuan kepada kelompok

Analisis Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Ecowisata LMDH Puncak Lestari

No.	Stakeholder	Peran
1	Pemerintah	1. Melaksanakan pendampingan pasca ijin pada lokasi perhutanan sosial yang sudah mendapat ijin
		2. Mendorong kelembagaan LMDH Puncak Lestari sehingga lebih berhasilguna untuk kesejahteraan anggota kelompok
		3. Mengatasi lahan-lahan kritis misalnya kepada pengantin saat pernikahan diwajibkan menanam 10 pohon sehingga tutupan lahan menjadi bertambah
		4. Membentuk adanya desa sentra produksi untuk peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan dapat menurun
		5. Pembinaan teknis, pendampingan, promosi produk hutan termasuk strategi pemasaran
		6. Membentuk pokja sehingga program perhutanan sosial tidak stagnan dilapangan namun tetap perlu adalah bantuan permodalan
		7. Membantu dari aspek finansial kepada anggota koperasi di kawasan puncak
		8. Membentuk koperasi dengan bantuan sosialisasi, biaya notaris, penyuluhan sehingga perlu konsultasi lebih lanjut termasuk stimulus pembiayaan kepada ukm dari sumber anggaran APBD
		9. Membangun rest area yang biayanya bersumber dari Kemenkop yang direncanakan dibangun sejumlah 150 kios untuk dapat dimanfaatkan ukm dengan syarat mempunyai KTP kabupaten Bogor.
		10. Pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dengan syarat produk-produk kerajinan asli Bogor
		11. Sinergi antara badan pariwisata dengan dinas koperasi adalah menyelenggarakan acara tourisem dan Dinas koperasi menyediakan barang-barang yang berasal dari ukm

2	Akademisi	1. Kajian sosek, rekomendasi kebijakan pemerintah daerah dalam konteks kemitraan kehutanan
3	Sektor Swasta	1. Melakukan pembuatan film tentang lokasi perhutanan sosial di LMDH Puncak Lestari dan sudah ditayangkan melalui youtube yang merupakan salahsatu strategi untuk promosi kepada publiK 2. Pasca pandemik, membuka wisata di LMDH Puncak Lestari yang berbasis outdoor yang bertemakan <i>silent tourism</i> /wisata kesunyian namun dengan protokol kesehatan yang ketat mengingat sudah tersedia sarana/prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya
4	Komunitas/ <i>Civil Society</i>	1. Mengelola bambu baik aspek budidaya maupun edukasi terkait pengembangan bambu 2. Mendampingi LMDH dalam konteks membantu pendampingan dan akses permodalan yang diharapkan adanya pengembangan potensi yang ada dilokasi 3. Anggota LMDH citamiyang menjadi anggota koperasi sehingga semua produk kopi dapat satu pintu yng berbentuk greenbeen bukan cherry dimana harga di pasaran lebih mahal dan saat ini sedang panen kopi jenis robusta 4. Mengeloa HKM di Sanggau ada 5 kelompok diamana ada penyuluh dan saat itu ada badan koordinasi penyuluhan yang menaungi semua penyuluh namun tidak bisa bekerja optimal karena keterbatasan pengetahuan termasuk bagaimana pembentukan ukm/umkm 5. Melakukan penguatan dilevel LMDH yang telah diberikan kepercayaan 610 ha mengingat lokasi LMDH Puncak Lestari termasuk kawasan puncak (hulu) 6. Pelatihan dengan petani dan pendamping nampaknya kapasitas dari aspek isu gender belum disentuh/perempuan masih terpinggirkan sehingga perlu dipikirkan bersama
5	Media Massa	Memviralkan lokasi perhutanan sosial/LMDH Puncak Lestari sehingga publik mengenal lokasi

Penggolongan Stakeholder

Official Development Assistance (1995) mengelompokkan *stakeholder* tersebut kedalam 3 kategori yaitu; stakeholder primer, stakeholder sekunder, dan stakeholder kunci. Berikut adalah tabel penggolongan stakeholder berdasarkan kategorinya di dalam pengelolaan ecowisata di LMDH Puncak Lestari.

Stakeholder Primer	Stakeholder Sekunder	Stakeholder kunci
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)	KPH & Asper Bogor Perum Perhutani
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Detara Foundation	LMDH Puncak Lestari, Kabupaten Bogor
Kementerian Koperasi dan UMK	Insitut Pertanian Bogor (IPB)	
Kementerian Komunikasi dan Informasi	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	
Kementerian Perdagangan	Universitas Indonesia (UI)	

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	Media Massa	
Dinas Koperasi Kabupaten Bogor	PUSDIKLAT PT. PLN Kab. Bogor	
Badan Promosi Pariwisata Daerah Bogor	Yayasan Bambu Indonesia	
	Insitut Pertanian Bogor (IPB)	

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Temuan pada penelitian ini adalah ekowisata yang dibangun dengan model kolaborasi yang terintegrasi dari multilevel stakeholder (Pemerintah Pusat, Pemda & ditingkat tapak), membuktikan munculnya alternatif – alternatif pemecahan masalah dalam disruptif yang terjadi saat ini. Jadi apabila sektor ekowisata sedang lesu maka kegiatan ekonomi lain misal; KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial): Herbal, Kopi dan wisata *staycation* tetap dapat berjalan, meskipun ada batasan dalam implementasinya
2. Peran stakeholders dalam melakukan interkasi dari bersifat satu arah/*top down* menjadi partisipatif serta terjadi memberdayakan masyarakat. Sehingga kemandirian ekonomi dan social budaya masyarakat disekitar kawasan hutan dapat terwujud dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

REKOMENDASI

1. Replikasi *sustainable integrated ecotourism model ini*, disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan *stakeholders* yang akan dikembangkan, sehingga pengembangan model ini bersifat akomodatif terhadap keberagaman kegiatan, kebutuhan serta kepentingan seluruh pihak dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan.
2. Kegiatan ekowisata menuntut adanya inovasi dan peningkatan peran seluruh pihak terkait. Maka penting adanya perencanaan menyeluruh dan terintegrasi dalam penyusunan bisnis model dengan mempertimbangkan *trend* pasar yang sangat dinamis, dan adopsi IT dalam pengembangan *Sustainable Integrated Ecotourism*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, University of California, Berkeley, 2018. Collaborative Governance in Theory and Practice.
- Basuki, Johan. 2018. Adminstrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi
- Eko Priyo Purnomo, Rizal Ramdani, Rendra Setyadiharja, Ady Muzwardi, LP3M, UMY. Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat.
- Islamy, La Ode Syaiful. 2018. Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi
- Koebele, Elizabeth A. Political Science Departement, University of Nevada Reno, USA. Integrating Collaborative Governance Theory with The Advocacy Coalition, 2018.
- Koeswara, Hendri, dkk. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Collaborative governance dalam kebijakan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga kopi bubuk koto tuo kabupaten tanah datar.

Zadek, Simon, and Emerald Insight journal Int, 2008. Global Collaborative Governance: there is no alternative, 2008.

Zaenuri, M. 2017. Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencana volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman.